

Cita-cita Politik untuk Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II*

Soepardjo RUSTAM

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pembangunan jangka panjang tahap kedua adalah berbicara mengenai pesan dan cita-cita. Pesan, karena kurun waktu itu terjadinya masih agak jauh di masa yang akan datang. Tidak mustahil bahwa kita semua yang ikut serta di dalam sarasehan kebudayaan sekarang ini belum tentu akan masih dapat mengalami perkembangan itu nanti. Cita-cita, karena pembangunan nasional jangka panjang di masa yang akan datang itu adalah bagian dari perjuangan kebangsaan kita, dan pembangunan yang akan datang itu pun kita harapkan akan tetap merupakan kesinambungan usaha mewujudkan cita-cita nasional kita, sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat dan maju. Dengan demikian pembangunan politik di masa yang akan datang itu juga harus kita lihat sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan cita-cita kebangsaan tersebut. Itulah sebabnya, sebagai pangkal tolak pemikiran dan pandangan kita mengenai kurun waktu tersebut, perlu terlebih dahulu memahami pembangunan politik Indonesia yang tumbuh dari cita-cita kebangsaan Indonesia.

POLITIK SEBAGAI AKTUALISASI CITA-CITA KEBANGSAAN KITA

Wawasan kebangsaan Indonesia merupakan wawasan yang amat penting dalam arti bahwa wawasan tersebut membentuk dan menjiwai sejarah Indonesia Modern. Sudah barang tentu wawasan tersebut mempunyai akar pertumbuhannya dari perkembangan sejarah Indonesia sebelumnya, sudah barang tentu pula bahwa perkembangan itu juga dipengaruhi oleh masuknya unsur-

*Disampaikan pada Sarasehan Tamansiswa, 10 November 1986.

unsur kebudayaan dan peradaban baru khususnya yang datang dari Eropa pada waktu itu. Namun segalanya itu telah diolah secara kreatif pada zaman Kebangkitan Nasional dan dari pertumbuhan tersebut lahirlah wawasan kebangsaan Indonesia. Wawasan kebangsaan ini pula yang menjadi kekuatan yang mengantarkan terus pergerakan kemerdekaan kita, sehingga perjuangan rakyat Indonesia itu sampai kepada Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdirilah Negara Kebangsaan Indonesia, dengan konstitusi kebangsaan Indonesia, dengan dasar negara dan ideologi Pancasila.

Sebagai peristiwa sejarah, proklamasi, konstitusi dan ideologi bukanlah hal-hal yang berdiri sendiri. Peristiwa besar yang telah melahirkan dan mengukuhkan bangsa Indonesia, yang telah menetapkan serta mencanangkan suatu ideologi nasional, memang tidak terlepas dari proses sejarah yang memangkunya, yaitu zaman Kebangkitan Nasional.

Di sekitar awal dasawarsa abad ke dua puluh ini, muncullah kebangkitan nasional rakyat Indonesia. Walaupun pada mulanya gerakan-gerakan itu masih bersifat majemuk dan terpisah-pisah, namun di dalam perkembangannya menemukan titik-temu yang mendasar.

Pada tahun 1928 dinamika kebangsaan tersebut diungkapkan secara lebih jelas dan tegas di dalam bentuk Sumpah Pemuda, di mana diikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Di dalam suasana pertumbuhan cita-cita kebangsaan ini pula, mendengunglah lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya menjadi lagu kebangsaan kita, sebagai manifestasi simbolik dari cita-cita kebangsaan Indonesia.

Perjalanan Kebangkitan Nasional Indonesia ini mengalami pasang-surut, sebagai akibat dari tumbuh dan berkembangnya bermacam-macam aliran yang secara sadar atau tidak telah menggiring perjalanan historis kebangsaan kita untuk kembali pada suasana dan sifat divergensi dan heterogenitas. Namun demikian, berbagai halangan dapat diatasi, berbagai rintangan dapat dilampaui, dan kebangkitan nasional telah mengantarkan rakyat Indonesia memasuki pintu gerbang Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dengan selesainya babak kebangkitan nasional, bangsa Indonesia memasuki zaman kemerdekaan, yang tidak lepas dari suasana perjuangan, karena zaman ini merupakan perjalanan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan.

Kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan adalah suatu anugerah, dan sekaligus adalah suatu tanggung jawab. Cobaan demi cobaan datang, baik dari luar maupun dari dalam, yang membawa serta ancaman,

gangguan, dan hambatan-hambatan. Zaman kemerdekaan bukanlah perjalanan yang tanpa rintangan. Ini terjadi secara berantai dan berangkai dari sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1965.

Selama 20 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dari tahun 1945 sampai tahun 1965, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dari segala macam ancaman dan marabahaya. Dari tahun 1945 hingga pengakuan kedaulatan menjelang akhir tahun 1945, kita berjuang dalam perang kemerdekaan. Melalui perjuangan berat dan lama, bangsa kita berhasil membulatkan wilayah Indonesia dengan merebut kembali Irian Jaya pada tahun 1962 yang semula masih berada dalam kekuasaan Belanda. Sejak pengakuan kedaulatan dan pada tahun-tahun sesudahnya, kita berjuang melawan bahaya-bahaya yang datang dari paham-paham federalisme, separatisme, kesukuan, kedaerahan, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tidak jarang segala ancaman dan bahaya tadi bercampur dengan subversi asing.

Gerak percaturan politik itu menjangkau baik kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kemasyarakatan, sehingga suasana "multi-ideologi" mempengaruhi pula kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita. Salah satu episode yang dapat secara gamblang mengungkapkan betapa masalah ideologi merupakan hal yang amat sentral pada masa itu adalah terjadinya Peristiwa Madiun: Pemberontakan PKI-Muso. Pada tanggal 1 Desember 1948 tokoh-tokoh PKI di Madiun memproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia." Bahwa pemberontakan PKI-Muso itu mempunyai asas ciri ideologi, amatlah jelas. Tetapi Pancasila, ideologi kebangsaan kita, merupakan acuan penangkal yang kuat.

Ditandatanganinya pengakuan kedaulatan sebagai salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) bukanlah berarti selesainya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan. Di tingkat internasional, kita masih menghadapi masalah Uni Indonesia-Belanda dan terutama masalah Irian Jaya. Di tingkat nasional pergolakan-pergolakan pun masih terjadi: ada gerakan DI/TII/NII, petualangan APRA, pergolakan RMS, pertentangan-pertentangan politik yang sifatnya terbuka pada jalur ketatanegaraan.

Terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 adalah suatu episode yang penting di dalam perjalanan bangsa Indonesia, karena bentuk negara kita sepenuhnya dikembalikan kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Namun, perjalanan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan persatuan ternyata belum memperoleh ketetapan dan kemantapan yang meyakinkan. Hal

ini disebabkan oleh berbagai faktor. Sistem ketatanegaraan sebagaimana ditentukan di dalam UUDS 1950 yang berlaku pada waktu itu mengandung percampuran yang tidak serasi antara "Weltanschauung" peserta kebangsaan di satu pihak dengan "Weltanschauung Liberalistik" di lain pihak. Dalam pada itu, sifat kesementaraan dari konstitusi itu sendiri mengundang pergulatan politik dan pergulatan ideologi untuk memberi ciri pada bentuk dasar dari Negara Indonesia.

Kehidupan politik formal dengan sendirinya tumbuh di dalam suasana perpecahan, di dalam sekat-sekat pengkotakan politik ideologis yang bersifat struktural dan dogmatik. Pertumbuhan kekuatan politik seperti itu tercermin di dalam jatuh-bangunnya kabinet, silih berganti, yang menunjukkan ketidakmantapan dari sistem yang berlaku.

Proses terpecah-pecahnya ideologi seperti itu mengalami peningkatan, makin intensif dan ekstensif, dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum. Dan tanpa disadari, PKI yang dalam tahun 1948 telah melancarkan pemberontakan, bahkan memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia, memiliki pula kesempatan dan hak untuk ikut serta di dalam pergulatan politik dan ideologi tersebut.

Gejolak politik ideologi itu terus berlanjut hingga masa sesudah dibentuknya DPR dan Konstituante. Pergolakan yang bersifat separatisme ideologis maupun teritorial terjadi, perpecahan pun semakin melukai persatuan bangsa. Bahkan di dalam sidang Konstituante terungkap secara terbuka perpecahan ideologi yang sifatnya mendasar, yakni pada waktu diperdebatkan tentang dasar negara. Hanya melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, situasi itu dapat diatasi.

Tetapi sejarah mencatat, bahwa problema ideologi dan masalah yang menyangkut kemantapan Pancasila masih menghadang perjalanan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain karena dekrit itu sendiri dipermasalahkan. Di samping itu, pernyataan berlakunya kembali UUD 1945 tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan yang konsekuen dan konsisten, sehingga penyimpangan-penyimpangan masih terjadi.

Pancasila dipandang melulu sebagai wadah dan bukan isi, sehingga kekuatan-kekuatan politik dan kemasyarakatan berpacu untuk mengisinya dengan ciri ideologi mereka masing-masing. Kehidupan politik, baik pada tataran institusional maupun pada tataran kemasyarakatan masih tidak berbeda dengan situasi sebelumnya. Kesadaran, bahwa Pancasila adalah wadah dan sekaligus juga isi, kurang dikembangkan. Pada masa itu, belum disadari bahwa Pancasila dapat mewadahi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, yang bersatu, merdeka dan berdaulat, justru karena isinya itu.

Di dalam kemelut politik yang tidak kunjung selesai itulah PKI dengan jembatan proses Nasakom, membangun kekuatan, baik di tingkat kenegaraan, di tingkat kemasyarakatan. Semua itu akhirnya bermuara kepada terjadinya Gerakan G-30-S/PKI. Bangsa Indonesia ditantang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan persatuannya.

Peristiwa demi peristiwa yang menyertai perjalanan bangsa kita itu telah menyentak kesadaran rakyat Indonesia untuk mengambil hikmah dari pengalaman sejarahnya: bahwa jalan yang paling tepat untuk kita tempuh sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat adalah kembali kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. "Engagement" dan "Commitment" politik total kepada Ideologi Pancasila adalah pilihan yang disimpulkan dari pengalaman sejarah yang berat dan panjang ini. Dan, itulah pula yang menjadi sumber motivasi bagi kelahiran Orde Baru di atas pentas sejarah nasional.

Tekad dan kehadiran Orde Baru, ditandai oleh keinginan yang kuat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian, tekad politik untuk menata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan berdasarkan Pancasila harus dilaksanakan setapak demi setapak, karena suasana kehidupan multiideologi yang menjadi sumber perpecahan dan diintegrasikan bangsa, masih belum tersembuhkan dari kehidupan bangsa kita. Selain itu, pembangunan nasional harus tetap dilaksanakan secara konstitusional serta diselenggarakan secara terencana berkesinambungan.

Dengan kenyataan sejarah yang seperti itu, perjalanan politik Orde Baru pun harus terlebih dulu melampaui beberapa fase pengamalan ideologis, untuk mengantar bangsa Indonesia memasuki fase Pengamalan Pancasila.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur sejak tahun 1971 merupakan langkah politik yang secara nyata membedakan Orde Baru dengan pemerintahan sebelumnya. Proses pemilihan umum itu juga merupakan gambaran dari tahap-tahap kristalisasi politik di sektor infrastruktural, di mana berlangsungnya proses penyederhanaan kehidupan pertanian, serta penyatuan langkah di dalam derap pembangunan nasional, yang secara konsisten dilaksanakan oleh Orde Baru. Pemilihan Umum 1971 merupakan langkah awal untuk melihat realitas keberadaan daripada kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat.

Kemenangan Golkar yang cukup meyakinkan pada Pemilihan Umum 1971 merupakan titik awal yang penting dari perombakan struktur politik Indonesia. Terbentuknya kekuatan mayoritas mutlak Golkar dalam lembaga-legislatif, baik pada tingkat nasional maupun daerah, merupakan salah satu jaminan bagi keabsahan sistem politik Orde Baru.

Keadaan ini memungkinkan dimatangkannya kondisi politik yang mengarah kepada penyederhanaan jumlah partai-partai politik di Indonesia, yang kemudian terwujud melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975, di mana hanya dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golkar. Mendampingi kekuatan sosial politik itu, bangsa Indonesia memiliki ABRI yang mengemban dwifungsinya.

Dipandang dari segi jumlahnya, perubahan dari sembilan partai politik (Partai NU, Parmusi, Perti, PNI, PSII, IPKI, Partai Kristen, Partai Katolik dan Murba) menjadi dua itu, merupakan prestasi politik yang luar biasa. Hal itu merupakan sesuatu yang hampir mustahil untuk terwujud pada masa sebelumnya. Prestasi politik Orde Baru dengan Undang-undang No. 3/1975 itu bukan hanya berkenaan dengan penyederhanaan jumlah partai politik, tetapi juga tidak terlepas dari kenyataan tentang ditematkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas utama dari Partai Politik dan Golkar (Pasal 2 ayat 1). Walaupun dalam Pasal 2 ayat 2 masih tetap diakui adanya asas/ciri lain.

Permasalahan yang dihadapi justru terletak pada kenyataan tentang tidak konsistennya penerimaan formal itu dengan perilaku politik yang ditampilkan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik dimaksud. Keadaan yang kurang memuaskan itu sebenarnya merupakan kompleksitas kehidupan politik, yang terbentuk dari berbagai faktor yang berinteraksi, namun diyakini bahwa sebab utamanya justru bertolak dari kenyataan masih dominannya asas/ciri spesifik dari partai-partai politik tersebut.

Dalam pada itu, Sidang Umum MPR tahun 1978, telah tampil sebagai momentum yang mempunyai nilai kualitatif strategis. Sidang tersebut antara lain menghasilkan Ketetapan MPR-RI Nomor II Tahun 1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Langkah tersebut dilanjutkan dalam Sidang MPR-RI 1983, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik, yang menetapkan pula bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah Pengamalan Pancasila.

Dengan tekad ini, ideologi Pancasila telah kita tempatkan sebagai sumber nilai dan sekaligus sebagai "motivating force" di dalam rangka pembangunan. Harapan ini bukan merupakan hal yang mustahil, karena ideologi, terutama jika dalam dirinya terkandung nilai-nilai operasional yang dapat membangkitkan kesadaran dan solidaritas, yang menuntut ketaatan dan sekaligus komitmen untuk bertindak, bukan saja tetap relevan sebagai sumber motivasi pembangunan, tetapi juga dapat memberi dorongan bagi tegaknya sikap-sikap disiplin di dalam proses pembangunan itu. Pada tingkat kesadaran

semacam ini, ideologi akan menjadi sumber nilai, yang di samping memberi motivasi bagi penyelenggaraan pembangunan, juga menjadi pengendali efektif dari perilaku orang-orang yang terlibat di dalam proses pembangunan itu. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai sumber motivasi bagi seluruh gerak pembangunan nasional, dan menjadi satu-satunya asas kehidupan politik kita, berarti kita telah mengarah secara mantap menuju integrasi nilai yang lebih tuntas.

Berdasarkan atas perkembangan itu kita sampai kepada tahap lebih lanjut, yaitu keputusan politik yang merupakan konsensus nasional untuk menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, yaitu Tap MPR No. 11 Tahun 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan ini kemudian telah dijabarkan ke dalam undang-undang di bidang politik yang baru saja disahkan oleh DPR-RI. Konsensus ini merupakan prestasi politik yang tidak pernah kita capai sebelumnya. Perjalanan kehidupan politik nasional kita, tampaknya memerlukan waktu antara 35 hingga 40 tahun untuk sampai kepada konsensus itu.

MEMBANGUN KERANGKA LANDASAN POLITIK

Secara khusus marilah kita lihat proses maupun produk usaha Orde Baru di dalam membangun "design" politik nasional kita. Berbicara mengenai arah dan jalannya pembangunan politik nasional kita tentu saja harus berangkat dari pemahaman mendasar mengenai "the political will" dari Orde Baru. Apakah political will dari Orde Baru tersebut. Kiranya sudah jelas dari uraian di atas yaitu tekad untuk mengadakan penataan kehidupan bangsa dan negara yang sifatnya mendasar dan menyeluruh berdasarkan kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pembangunan politik itu mencakup sekurang-kurangnya dua dimensi: dimensi struktural dan dimensi kultural. Pembangunan struktur politik meliputi dua bidang: *pertama*, suprastruktur politik dan *kedua*, infrastruktur politik. Tugas sejarah pertama-tama yang dihadapi oleh Orde Baru di dalam tahap awalnya adalah mengadakan penataan suprastruktur politik nasional. Berdampingan dengan itu adalah mengadakan penataan infrastruktur politik yang sesuai dengan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dan ini ditempuh melalui proses yang sifatnya konstitusional dan bertahap. Proses ini kemudian diberi kelengkapan yang lebih mendasar oleh Ketetapan-ketetapan MPR tahun 1978 dan tahun 1983 (P-4 dan Pancasila sebagai satu-satunya asas) yang keseluruhannya mengukuhkan pembangunan kultur politik kita.

Berdasarkan atas bacaan terhadap jalannya sejarah politik selama Orde Baru ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berikut:

- (1) Bahwa pembangunan politik telah terjadi dalam suatu wawasan strategi yang jelas, dan diselenggarakan dengan suasana penuh kearifan, kebijaksanaan dan disertai dengan semangat tawakal dan sabar.
- (2) Bahwa pembangunan politik itu melingkupi proses pembaharuan di dalam suprastruktur politik nasional, infrastruktur politik nasional dan kultur politik nasional.
- (3) Ditinjau dari perkembangan *suprastruktur politik*, dapat dikatakan terjadi pertumbuhan pembaharuan yang makin mantap, baik di dalam tata kerja kelembagaannya maupun di dalam produk-produk keputusan politik yang dihasilkannya.
- (4) Ditinjau dari perkembangan *infrastruktur politik*, tampak bahwa jalannya pembaharuan tata politik nasional lebih banyak mengalami kendala-kendala serta hambatan, baik pada tataran infrastruktur politik yang formal maupun pada tataran infrastruktur politik yang tidak formal. Ada dua faktor sekurang-kurangnya yang mempengaruhi kenyataan ini:
 - a. Masih terasa adanya tendensi kebhinnekaan yang sifatnya desintegratif, sehingga cenderung keluar ataupun merusak faktor ketunggalikaan.
 - b. Proses konsolidasi organisasi maupun konsepsi khususnya pada Partai-partai Politik masih amat lemah.
- (5) Ditinjau dari perkembangan *kultur politik*, kita mengalami tumbuhnya gerakan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

STABILITAS POLITIK DAN PERTUMBUHAN DEMOKRASI KITA

Seluruh proses pembangunan politik pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya adalah merupakan pertumbuhan demokrasi kita.

Ada kaitan yang amat erat dan mendasar antara wawasan kebangsaan Indonesia dan pertumbuhan demokrasi kita itu. Wawasan kebangsaan adalah suatu wawasan yang inti dasarnya adalah persatuan kesatuan dalam persamaan dan kebersamaan. Persamaan dan kebersamaan itu terletak di dalam pandangan mendasar mengenai derajat kodrat kemanusiaan sebagai ciptaan Tuhan yang pada kehidupan kebangsaan kita merupakan suatu ungkapan dan aktualisasi dari kemanusiaan tersebut. Maka itulah wawasan kebangsaan kita adalah wawasan kebangsaan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan pandangan yang mendasar mengenai kemanusiaan, kebangsaan, persatuan, kesatuan, kesamaan dan kebersamaan itulah maka perjuangan bangsa Indonesia menuju kepada cita-cita kemajuan itu, tertuang pula di dalam cita-cita demokrasi. Bagi kita bangsa Indonesia, esensi dari demokrasi adalah persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Bagi kita cita-cita demokrasi itu bukanlah kemerdekaan semata-mata. Demokrasi adalah cita-cita kemerdekaan di dalam persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Demokrasi adalah cita-cita kemerdekaan kebangsaan dan kebudayaan.

Itulah sebabnya maka demokrasi kita itu tidak hanya terbatas kepada demokrasi politik saja, melainkan juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kebudayaan. Cita-cita ini pun tertuang di dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 serta dengan penjelasan-penjelasanannya.

Pembangunan politik nasional yang saya kemukakan di atas itu adalah suatu perjalanan membangun perwujudan demokrasi kita itu pula. Maka dari itu pembangunan politik itu pun bukan pembangunan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai kaitan dan independensi pula dengan pembangunan-pembangunan ekonomi dan pembangunan kebudayaan serta kemasyarakatan. Itu pula sebabnya pembangunan politik itu juga kita kembangkan untuk dapat mendukung terjadinya pertumbuhan demokrasi ekonomi dan demokrasi kemasyarakatan dan kebudayaan di Indonesia ini. Dalam konteks inilah perlu kita pahami arti penting dari stabilitas politik.

Pengalaman selama Orde Baru ini memberikan pelajaran kepada kita betapa stabilitas itu merupakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi bangsa kita untuk mengembang-tumbuhkan pembangunan di berbagai bidang, khususnya pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari pandangan politik, Orde Baru merupakan sejarah stabilitas yang paling panjang di dalam kurun waktu sejarah Indonesia modern. Karena itu pula Orde Baru dapat tumbuh menjadi Orde Pembangunan.

Dari pelajaran tersebut kita perlu menarik hikmah yang kiranya mempunyai relevansi pula bagi pembangunan jangka jauh di depan nanti betapa stabilitas politik mempunyai arti yang mendasar. Sudah barang tentu stabilitas tersebut adalah stabilitas yang dinamis, yang kreatif pula untuk membangun bidang-bidang kesejahteraan, kemasyarakatan dan kebudayaan. Stabilitas bukanlah sebuah kondisi yang kalau sudah selesai dapat ditanggalkan. Stabilitas adalah sebuah kondisi yang diperlukan adanya secara terus-menerus. Kehidupan bangsa dan negara yang penuh gejolak dan instabilitas politik akan tidak memungkinkan terjadinya pembangunan-pembangunan yang menyeluruh dan makin kompleks sifatnya. Ini semua karena demokrasi

politik tumbuh berkembang berjalanan dengan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kebudayaan. Stabilitas politik merupakan bagian dari aktualisasinya wawasan kebangsaan kita yang sifatnya dinamis dan integralistik.

Dengan melihat perkembangan sejarah kebangsaan di dalam konteks pertumbuhannya demokrasi kita itu, menjadi jelaslah betapa pentingnya fase meletakkan kerangka landasan pembangunan saat ini. Dengan usaha tersebut kita berusaha membangun basis-basis pertumbuhan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kebudayaan kita. Kerangka landasan pembangunan politik kiranya makin lama telah menjadi makin mantap, dan makin jelas pula *design* maupun strukturnya, sebagaimana sudah saya uraikan di depan. Kerangka inilah yang harus dijaga dan dikembangkan terus secara kreatif. Politik di masa yang akan datang akan menjadi lebih kompleks dan lebih interdependen. Kalau problem politik di masa yang telah lalu terutama adalah masalah-masalah yang sifatnya ideologikal, di masa yang akan datang di samping problem ideologikal, kita akan dihadapkan pula kepada masalah-masalah sosial ekonomi, masalah-masalah kemasyarakatan sebagai problem politik. Insya Allah, kerangka landasan politik, yang mencakup suprastruktur, infrastruktur dan kultur politik itu tetap akan dapat menciptakan stabilitas politik yang mendukung terwujudnya kerangka landasan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial serta kebudayaan.

PERJALANAN KE DEPAN: PERSPEKTIF KENUSANTARAAN

Dengan mencoba memikirkan pembangunan jangka panjang yang kedua pertanyaan yang kita hadapi sebetulnya adalah: Bagaimanakah bakal kelanjutannya sejarah kebangsaan Indonesia. Bagaimanakah bakal kelanjutannya wawasan kebangsaan kita.

Terlebih dahulu perlu dilihat secara jelas bahwa wawasan kebangsaan Indonesia itu membawa di dalamnya wawasan kemajuan. Kebangkitan nasional terjadi karena adanya cita-cita dan kemauan untuk maju. Maka itu wawasan kebangsaan Indonesia pada hakikatnya bukanlah wawasan yang menutup diri.

Lebih lanjut perlu kita perhitungkan pula hasil-hasil yang akan kita capai dari pembangunan nasional jangka panjang yang pertama ini. Apabila sasaran utama yang dapat dikatakan final dari pembangunan jangka panjang yang pertama ini adalah terwujudnya kerangka landasan pembangunan dan Insya Allah dalam waktu tujuh tahun mendatang ini dapat kita wujudkan semuanya itu dengan selamat sentosa -- maka jelas sekali bahwa wawasan

kebangsaan kita itu telah makin diperlengkapi pula untuk melangkah mewujudkan kemajuan-kemajuan lebih jauh lagi. Dengan didukung oleh kerangka landasan demokrasi politik, kerangka landasan demokrasi ekonomi dan kerangka landasan demokrasi sosial serta kebudayaan, maka bangsa kita diberi bekal kemungkinan untuk tumbuh dan maju terus.

Stabilitas politik yang dapat tumbuh dan berkembang selama ini telah pula membawa hasil-hasil yang perlu pula diperhatikan dan diperhitungkan. Di samping mengembangkan tradisi kehidupan bangsa dan negara secara konstitusional dalam wujud perputarannya kalender demokrasi politik, telah pula dikembangkan tumbuhnya kemampuan administrasi, disiplin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta tentu saja tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai wilayah di negara kita. Dipadukan dengan perkembangan di bidang transportasi dan komunikasi, maka semua itu telah mulai menunjukkan adanya pusat-pusat awal dari proses modernisasi di berbagai wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa perkembangan kehidupan bangsa dan negara kita telah tumbuh di dalam perspektif kenusantaraan.

Dalam pengertian itu, maka Wawasan Nusantara akan menjadi referensi yang amat penting bagi perkembangan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Wawasan kebangsaan yang terjalin dengan wawasan kemajuan, telah membawa masyarakat Indonesia modern memasuki era Nusantara di masa yang akan datang, yaitu eranya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan budaya, satu kesatuan pertahanan keamanan: satu bentuk kesatuan yang penuh dinamika dan sesuai dengan sifat dasar masyarakat Indonesia yaitu bhinneka tunggal ika. Dengan kerangka landasan pembangunan yang dihasilkan oleh pembangunan nasional jangka panjang yang pertama, cita-cita kebangsaan kita akan memasuki zaman Nusantara.

• Mungkin pada saat itulah akan terasa betapa bangsa, negara dan masyarakat Indonesia itu akan mengalami gerak-gerak yang ruang lingkungannya menjadi luas, interaksinya menjadi makin cepat, kemungkinan-kemungkinannya juga menjadi makin terbuka. Masyarakat Indonesia akan tumbuh menjadi multiplikatif dan makin majemuk. Dan sudah barang tentu perkembangan ini juga akan membawa dampak sampingan seperti misalnya terjadi problem interdependensi yang dapat menjadi rumit, tumbuhnya kecenderungan desintegratif, keterkaitan dengan perkembangan internasional yang menjadi makin meningkat pula. Doktrin Ketahanan Nasional akan menjadi makin penting. Di dalam perkembangan itu maka Trilogi Pembangunan akan pula harus dilaksanakan dalam perspektif kenusantaraan. Di dalam perkembangan seperti itu, stabilitas politik akan menjadi semakin diperlukan untuk menjaga perkembangan masyarakat yang menjadi makin cepat, makin luas ruang lingkungannya, makin banyak interaksinya, makin majemuk permasalahannya.

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI SASARAN UTAMA

Dapatkah kita membuat suatu perkiraan pula mengenai sasaran utama di dalam pembangunan nasional jangka panjang tahap II itu nanti? Apabila sasaran utama pembangunan nasional jangka panjang tahap yang pertama, sebagaimana dikemukakan di atas adalah terwujudnya kerangka landasan pembangunan nasional, yaitu kerangka yang menjadi landasan pertumbuhannya demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kemasyarakatan kita, maka upaya selanjutnya kiranya adalah mengusahakan agar kerangka itu dapat dijaga dan dikembangkan terus oleh para pemakai kerangka itu. Dengan perkataan lain apabila sasaran utama jangka panjang pertama adalah kerangkanya, sasaran utama jangka panjang kedua adalah manusia-manusianya, manusia yang akan memakai dan mengembangkan kerangka itu: baik sebagai "dragers" maupun sebagai "ontwikkelaars" dari pertumbuhan demokrasi kita. Dengan perkataan lain perhatian utama di dalam pembangunan jangka panjang kedua itu nanti akan banyak ditujukan kepada pembangunan sumber daya manusia.

PENUTUP

Demikianlah beberapa pemikiran yang ingin saya sumbangkan pada sara-sehan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Tamansiswa dalam rangka merayakan Hari Pahlawan yang mengambil tema tentang pembangunan nasional jangka panjang yang kedua. Saya tidak perlu memberikan ulasan mengenai relevansinya bagi kita semua membahas tema ini.

Bagi kita, pembangunan adalah hal cita-cita dan perjuangan. Berdasarkan atas pengalaman sejarah di masa yang telah lampau telah saya kemukakan bahwa pembangunan politik merupakan aktualisasi dari cita-cita kebangsaan kita. Dan cita-cita ini masih tetap menyejarah sampai saat ini.

Sebagai bagian dari usaha mewujudkan kerangka landasan pembangunan yang merupakan sasaran akhir dari pembangunan nasional jangka panjang kita tahap yang pertama, maka kita telah membangun pula kerangka landasan politik, yang meliputi pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan kultur politik kita. Dengan berpegang kepada kerangka landasan politik itu telah tumbuhlah kekuatan-kekuatan politik nasional kita, dalam wujud Partai-partai Politik, Golongan Karya serta ABRI.

Pembangunan politik itu pun ditujukan terutama kepada terselenggaranya stabilitas politik, yang terkait dengan pelaksanaan Triologi Pembangunan dan perwujudan Ketahanan Nasional. Dalam rangka itulah maka pembangunan

politik merupakan pembangunan demokrasi politik, yang terkait secara terpadu dengan pertumbuhan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial dan kebudayaan.

Atas dasar pengalaman-pengalaman tersebut, maka pembangunan nasional jangka panjang yang akan datang itu nanti akan merupakan proses kelanjutan dari pertumbuhan demokrasi kita, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosio-kultural berdasarkan Pancasila. Di masa mendatang itu nanti perspektif kenusantaraan akan menjadi makin tampil ke depan, sehingga dengan demikian maka Trilogi Pembangunan harus pula dibayangkan pelaksanaannya secara terkait dengan perspektif kenusantaraan tersebut. Dalam hubungan ini stabilitas politik nasional tetap merupakan elemen yang amat penting untuk menjadi kondisi yang mendukung pertumbuhan masyarakat yang menjadi makin maju, bergerak makin cepat dan majemuk, dengan interaksi yang menjadi lebih multiplikatif.

Itu semua adalah bagaikan pesan-pesan yang dapat kita angkat dari pendalaman kita mengenai sejarah kebangsaan Indonesia modern hingga hari ini. Itu semua adalah ungkapan dari cita-cita kebangsaan yang menjiwai kita semua sampai hari ini sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berusaha untuk menjadi bangsa yang maju.

Pesan dan cita-cita itu bukanlah sekedar suatu dambaan tanpa didasarkan kepada realisme sejarah. Baiklah kita catat betapa wawasan kebangsaan Indonesia, yang bermula pada awal abad kedua puluh ini, ternyata masih tetap mengantarkan perjalanan rakyat Indonesia hingga sampai hari ini, yang berarti berjalan hampir satu abad lamanya. Atas dasar itulah kita dibenarkan untuk mengharapkan bahwa kerangka landasan pertumbuhan demokrasi kita berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 ini pun mempunyai daya yang mampu menjangkau puluhan, bahkan ratusan tahun di masa yang akan datang.

Kita dibenarkan untuk mengharapkan bahwa lagu kebangsaan kita Indonesia Raya masih akan tetap menggema. Bendera Kebangsaan kita Sang Dwiwarna masih tetap akan berkibar. Bangsa Indonesia akan masih tetap bersatu, merdeka dan berdaulat. Pancasila masih tetap menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional. Konstitusi Proklamasi masih tetap menjadi acuan bakunya tradisi politik kebangsaan kita. Demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial dan kebudayaan masih tetap tumbuh berdasarkan asas Pancasila.

Untuk ini maka dibangunlah terus sumber daya manusia, yang tumbuh dalam wawasan kebangsaan dan wawasan kemajuan, diperkaya dengan kualitas penguasaan ilmu dan teknologi, dilandasi oleh sikap dan pandangan dasar Pancasila.